

SKRIPSI

**ANALISIS PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP KINERJA
KEUANGAN KABUPATEN GOWA**

**ASHARI HASAN
105730408113**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2017**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Analisis Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten Gowa

Nama Mahasiswa : Ashari Hasan

No. Stambuk/NIM : 105730408113

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis/ Akuntansi

Jenjang Studi : Strata Satu (S-1)

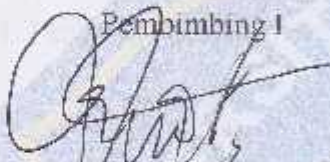
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Telah diseminarkan dan diujikan Pada Seminar Skripsi Tanggal 7 Oktober 2017

Makassar, Oktober 2017

Menyetujui

Pembimbing I



Dr. H. Andi Rustam SE, AK, CA, CPAI
NIDN : 0909096703

Pembimbing II



Samsul Riza SE, MM
NBM : 947 998

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar



Ismail Rasulong, SE, MM
NBM 903078

Ketua Jurusan Akuntansi



Ismail Badollahi, SE, M.Si, Ak.CA
NBM. 1073428

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas Nama ASRIATI HASAN, Nim 10573 04081 13 ini Telah Diperikasa dan Diterima oleh Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : Tahun 1439 II/ 2017 M dan Telah Dipertahankan di Depan Penguji Pada Hari Sabtu, 7 Oktober 2017 M. Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar

17 Muharram 1439 H

Makassar, -----

7 Oktober 2017 M

Panitia Ujian :

1. Pengawas Umum : Dr. H. Rahman Rahim, SE, MM
(Rektor Unismuh Makassar) 
2. Ketua : Ismail Rasulong, SE, MM
(Dekan Fakultas Ekonomi) 
3. Sekretaris : Drs. H. Sultan Sarda, SE, MM
(Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi) 
4. Penguji:
 - a. Dr. H. Andi Rustam, SE, MM, Ak, CA, CPAI 
 - b. Saida Said, SE, M, Ak 
 - c. Hj. Naidah, SE, M, Si 
 - d. Asriati, SE, M, Si 

ABSTRAK

ASHARI HASAN (2017) “ Analisis Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten Gowa “ Di bimbing oleh pembimbing 1. H. Andi Rustam dan Pembimbing 2. Samsul Rizal.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh yang terjadi pada Analisis Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten Gowa.

Metode analisis data yang di gunakan adalah metode Deskriptif dimana data yang di peroleh melalui penelitian pada Kantor Bupati Gowa data hasil penelitian tersebut disusun, dikelompokkan, kemudian diinterpretasikan sehingga diperoleh gambar yang jelas mengenai fakta yang berlaku di lapangan. Kemudian metode Komperatif yakni menjelaskan secara detail tentang bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten Gowa.

Hasil analisis menunjukkan bahwa Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa dalam merealisasikan pendapatan asli daerahnya tergolong tidak efektif dan tergolong efisien, yakni pada tahun 2014 memiliki rasio efektifitas 62,19% dan rasio efisiensi 2,13% kemudian tahun 2015 memiliki rasio efektifitas sebesar 59,53% dan rasio efisiensi 2,71% dan pada tahun 2016 memiliki rasio efektifitas 32,96% dan rasio efisiensi sebesar 2,16% artinya Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa selama periode penelitian (2014-2016) kurang baik karena hampir semua perhitungan rasio mengalami penurunan kinerja.

Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr Wb

Puji dan syukur, atas kehadiran Allah SWT. Atas limpahan rahmat dan taufik-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, yang merupakan salah satu persyaratan dalam rangka penyelesaian studi pada Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar dengan judul ” *Analisis Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten Gowa* “

Dalam penyusunan skripsi ini penulis tidak luput dari berbagai hambatan dan tantangan baik dalam penelitian ini maupun dalam penyusunannya. Namun berkat ketabahan, ketekunan, kerja keras, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Untuk itu penulis menghatur terimakasih yang sebesar-besarnya :

Pertama, kepada bapak Abd.Rahman Rahim, SE.,MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.

Kedua, kepada bapak Dr. H. Andi Rustam SE, AK. CA dan bapak Samsul Risal SE,MM selaku pembimbing penulis yang telah banyak meluangkan waktunya serta dengan ihklas memberikan bimbingan, petunjuk dan pengarahan kepada penulis.

Ketiga kepada orang tua penulis, ayahanda tercinta, ibunda tercinta, serta kakak-kakak dan adik-adik yang senantiasa memberikan dukungan baik materi maupun doa selama penulis menyelesaikan tugas akhir ini.

Keempat, penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak Kantor Bupati Gowa yang telah memberikan bantuan serta memberikan masukan-masukan kepada penulis selama penelitian.

Kelima, penulis ucapkan terima kasih kepada teman-teman Akuntansi I, Sahrul, Wandu, Taufik, Das'ad, Guruh, Wahid, Aswar, Rizal, Acca, Illa, Jannah, Mirna dan masih banyak yang lainnya. Terima kasih atas motivasi dan dukungannya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya, penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik dari semua pihak demi kesempurnaan Skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan untuk kebaikan yang diberikan semua pihak, semoga mendapat balasan dari Allah SWT.

Makassar, Agustus 2017

Ashari Hasan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
ABSTRAK.	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABELviii
BAB I. PENDAHULUAN	
A.Latar Belakang Masalah.....	1
B.Rumusan Masalah	4
C.Tujuan Penelitian.....	4
D.Manfaat Penelitian	5
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A.Laporan Keuangan Daerah	6
B.Kinerja.....	7
1.Pengertian Kinerja.....	7
2. Pengertian Pengukuran Kinerja.....	9
3.Tujuan Penilaian Kinerja.....	10
4. Aspek Pengukuran Kinerja.....	11
C.Rasio Keuangan.....	13
D. Penelitian Terdahulu.	29
E. Kerangka Pikir.....	32
F. Hipotesis.	32

BAB III. METODOLOGI PENELITIAN

A.Lokasi Dan Waktu Penelitian	33
B.Metode Pengumpulan Data	33
C.Jenis dan Sumber Data	33
D.Metode Analisis Data	34
E.Defenisi Operasional	38

BAB IV. GAMBARAN UMUM INSTANSI

4.1 Tentang Pemerintah Daerah Kab Gowa	41
4.1.1 Sejarah Singkat Pemerintah Daerah Kab Gowa	41
A. Arti dan Makna Lambang Kab Gowa.....	44
B. Geografis Kab Gowa.....	45
4.2 Struktur Organisasi Pemerintah Daerah Kab Gowa	48

BAB V. PEMBAHASAN

5.1 Ringkasan Target Dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2014-2016 Pemerintah Kab Gowa.	51
5.2 Perhitungan Rasio Keuangan Daerah pada Kab Gowa.....	54
5.3 Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Kab Gowa	65

BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan.	72
6.2 Saran.	73
Daftar Pustaka.	75
Lampiran.	76

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tingkat Kemandirian dan Kemampuan Keuangan Daerah

Tabel 2.2 Kriteria Efektivitas Keuangan Daerah

Tabel 2.3 Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan

Tabel 5.1 Target dan Realisasi Tahun Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Tahun
Anggaran 2014-2016

Tabel 5.2 Perhitungan Rasio Aktivitas Pemerintah Kabupaten Gowa Tahun Anggaran
2014-2016

Tabel 5.3 Perhitungan *Debt Service Covarage Ratio* Kabupaten Gowa Tahun
Anggaran 2014-2016

Tabel 5.4 Perhitungan Rasio Pertumbuhan APBD Kabupaten Gowa Tahun Anggaran
20014-2016

Tabel 5.5 Rasio Keuangan Daerah Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2014-2016

Tabel 5.6 Rasio Efektifitas dan Efisiensi Pemerintah Kabupaten Gowa Tahun
Anggaran 2014-2016

Tabel 5.7 Rasio Aktivitas Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2014-2016

Tabel 5.8 *Debt Service Covarage Ratio* Kabupaten Gowa Tahun Anggaran
2014-2016

Tabel 5.9 Rasio Pertumbuhan Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2014-2016

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Persoalan keuangan daerah merupakan salah satu unsur utama dalam penyelenggaraan otonomi daerah, meskipun diakui bahwa berbagai variable lain juga mempengaruhi kemampuan keuangan daerah, seperti misalnya variabel sumber daya manusia, organisasi, manajemen, sarana dan prasarana serta variabel penunjang lainnya. Pentingnya variabel keuangan daerah berkaitan dengan kenyataan bahwa mobilisasi terhadap sumber-sumber daya keuangan daerah dipandang sebagai bagian yang paling krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah maka otonomi ini dititik beratkan pada daerah kabupaten atau kota karena daerah kabupaten atau kota berhubungan langsung dengan masyarakat.

Dalam menjalankan otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk menjalankan roda pemerintahan secara efektif dan efisien, mampu mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan, serta meningkatkan pemerataan dan

keadilan dengan mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah.

Keberhasilan otonomi daerah tidak lepas dari kemampuan dalam bidang keuangan yang merupakan salah satu indikator penting dalam menghadapi otonomi daerah. Daerah otonomi diharapkan mampu atau mandiri di dalam membiayai kegiatan pemerintah daerahnya dengan tingkat ketergantungan keuangan kepada pemerintah pusat mempunyai proporsi yang lebih kecil.

Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan tugas pembangunan. Anggaran daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrument kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah. Anggaran sebagai instrumen kebijakan dan menduduki posisi sentral harus memuat kinerja, baik untuk penilaian secara internal maupun keterkaitan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang selanjutnya mengurangi pengangguran dan menurunkan tingkat kemiskinan. Kinerja yang terkait dengan anggaran merupakan kinerja keuangan berupa perbandingan antara komponen-komponen yang terdapat pada anggaran.

APBD dapat digunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan pencapaian pembangunan, otoritas pengeluaran dimasa-masa yang akan datang, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar untuk evaluasi kinerja, alat untuk

memotivasi para pegawai, dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan oleh pemerintah daerah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas (pertanggungjawaban) pemerintah daerah atas sumber yang dipercayakan. Pemerintah daerah sebagai pihak yang diserahi tugas untuk menjalankan roda pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah pemerintah daerah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintahan daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah dilaksanakan.

Pengelolaan kinerja keuangan kabupaten Gowa meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Penilaian WDP pada pengelolaan kinerja keuangan daerah menunjukkan bahwa aparatur pemerintah masih lemah dalam mengelola keuangannya. Terlalu banyak kejanggalan arus anggaran baik dalam bentuk penerimaan maupun pengeluaran menjadi salah satu indikator yang di nilai menjadi penyebab buruknya sistem keuangan tersebut. Ada enam indikator yang paling lemah yakni; system administrasi yang serampangan, banyak kebocoran anggaran dalam pendapatan, lemahnya sistem pertanggung jawaban anggaran, peran Inspektorat lemah, SDM Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) kurang dan lemah, dan tidak adanya good will dari setiap stake holder dalam mengelola anggaran tersebut sesuai dengan skenario anggaran yang semestinya.

Analisis rasio keuangan APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Dengan analisa ini pemerintah dapat menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah, mengukur efektifitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah, mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya, mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah, dan dapat melihat pertumbuhan atau perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas maka dapat di angkat rumusan masalah yaitu :

“ Apakah Pendapatan Asli Daerah Mempengaruhi Kinerja Keuangan “?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan penelitian ini adalah untuk menganalisis laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Gowa dan mengetahui kinerja dalam mengelola keuangan daerahnya yang dinilai dengan menggunakan rasio keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Laporan Realisasi Anggaran padatahunanggaran 2014-2016.

D. Manfaat Penelitian

1. Sebagai salah satu media untuk memperdalam ilmu akademik penulis, dan memahami lebih dalam penerapan ilmu pengetahuan pada tataran teori dan aplikasinya.
2. Sebagai masukan bagi instansi pemerintahan daerah dalam hal pengukuran kinerja dalam pengelolaan keuangan pemerintahan daerah khususnya dengan pendekatan rasio keuangan.
3. Sebagai referensi bagi penulis atau pihak lain yang tertarik dengan kajian mengenai pengukuran kinerja pengelolaan keuangan daerah dengan menggunakan rasio keuangan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Laporan Keuangan Daerah

Sesuai dengan siklus akuntansi, setelah menyusun neraca saldo setelah penyesuaian, disusunlah laporan-laporan keuangan dengan mengambil data dari neraca saldo setelah penyesuaian. Berdasarkan Pasal 232 dari Permendagri No 13 Tahun 2006, Laporan keuangan pmda terdiri atas (Halim 2007)

1. Laporan realisasi anggaran
2. Neraca
3. Laporan arus kas
4. Catatan atas Laporan Keuangan

Namun demikian, dari sudut pandang akuntansi, dapat pula disusun laporan tambahan, yaitu laporan kinerja keuangan perubahan ekuitas dana (untuk entitas pmda secara keseluruhan) atau laporan perubahan rekening Koran pmda (untuk satuan kerja).

Sebagaimana halnya laporan laba rugi menunjukkan hasil usaha perusahaan dalam rentan waktu tertentu, Laporan Perhitungan APBD juga menunjukkan kinerja pmda sebagai penyusun dan pelaksanaan APBD. Dengan demikian, Laporan Perhitungan APBD menyajikan pendapatan pmda selama satu periode dan belanja untuk memperoleh pendapatan tersebut pada periode yang sama.

Nota Perhitungan APBD berisi ringkasan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan, serta kinerja keuangan daerah selama periode akuntansi pada tahun yang sedang berlangsung. Kinerja keuangan antara lain mencakup kinerja dalam

rangka pelaksanaan fungsi, program, dan kegiatan selama periode akuntansi, kinerja pelayanan yang dicapai, dan bagian belanja yang digunakan untuk kegiatan administrasi umum, operasi dan pemeliharaan serta investasi.

Laporan perubahan ekuitas dana pmda menyajikan informasi mengenai perubahan surplus/defisit anggaran akibat berbagai transaksi yang terjadi dalam suatu periode. Laporan perubahan ekuitas dana merupakan pelengkap dari Laporan Perhitungan APBD.

Laporan arus kas menyajikan informasi tentang kemampuan dalam memperoleh kas dan menilai penggunaan kas untuk kebutuhan daerah dalam satu periode akuntansi. Penerimaan dan pengeluaran kas di klasifikasi kan menurut kegiatan operasi, investasi, dan pembiayaan.

Neraca adalah laporan keuangan yang menyajikan posisi keuangan daerah pada saat tertentu, biasanya pada akhir tahun anggaran. Laporan ini dibuat untuk menyajikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai aktiva, utang.

B. Kinerja

1. Pengertian Kinerja

MenurutMahsun, SulistyowatidanPurwanu (2007)

“ Kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi”.

Menurut Bastian (2006)

“ Kinerja adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program/ kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi. Secara umum, kinerja merupakan prestasi yang dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu”.

Menurut AnwarPrabuMangkunegara (2000)dalam Wikipedia

(13 November 2011):

“Kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya”.

MenurutVeizalRivai (2004) mengemukakan kinerja dalam Wikipedia

(13 November 2011) :

“ Merupakan perilaku yang nyata yang ditampilkan setiap orang sebagai prestasi

(dalamMahsun, SulistyowatidanPurwanu 2007)pengukurankinerja (kerja yang dihasilkanolehkaryawan sesuai dengan perannya dalam perusahaan”.

Dari definisi diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja merupakan suatu kondisi yang harus diketahui dan di konfirmasikan kepada pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil suatu instansi di hubungkan dengan visi yang di emban suatu organisasi atau perusahaan serta mengetahui dampak positif dan negatif suatu kebijakan.

2. Pengertian Pengukuran Kinerja

Menurut Robertson (*performance measurement*) adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas: efisiensi, penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa, kualitas barang dan jasa (seberapa baik barang dan jasa diserahkan kepada pelanggan dan sampai seberapa jauh pelanggan terpuaskan), hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan, dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan.

Menurut Lohman (dalam Mahsun, Sulistyowati dan Purwanu 2007:157) ,pengukuran kinerja adalah suatu aktivitas penilaian pencapaian target-target tertentu yang diderivasi dari tujuan strategi organisasi.

Pendapat lain menurut James B. Whittaker (dalam Bastian 2006) pengukuran kinerja adalah suatu alat manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas.

Menurut Larry D Stout dalam *Performance Measurement Guide* (Bastian 2006)

pengukuran kinerja merupakan proses mencatat dan mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam arah pencapaian misi (*mission accomplishment*) melalui hasil-hasil yang ditampilkan berupa produk, jasa, ataupun suatu proses.

Menurut Mardiasmo (2002)

“Sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non finansial”.

Dari berbagai pengertian diatas dapat di simpulkan bahwa pengukuran kinerja merupakan evaluasi atau penilaian terhadap pencapaian pelaksanaan kegiatan suatu organisasi berdasarkan tujuan, sasaran, standar dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Informasi mengenai hasil pengukuran ini juga akan menjadi referensi dalam penentuan standar kinerja untuk masa yang akan datang. Berapa besaran target yang menjadi acuan pencapaian pada periode berikutnya juga bertumpu pada hasil pengukuran kinerja yang dilakukan.

3. Tujuan Penilaian Kinerja

Prestasi pelaksanaan program dapat diukur untuk mendorong pencapaian prestasi tersebut. Pengukuran prestasi yang dilakukan secara berkelanjutan memberikan umpan balik untuk upaya perbaikan secara terus menerus dan pencapaian tujuan dimasa mendatang.

Peranan pengukuran prestasi sebagai alat manajemen untuk **(Bastian 2006)**

1. Memastikan pemahaman para pelaksana dan ukuran yang digunakan untuk pencapaian prestasi.
2. Memastikan tercapainya skema prestasi yang disepakati.
3. Memonitor dan mengevaluasi kinerja dengan pembanding skema kerja dan pelaksanaan.
4. Memberikan penghargaan dan hukuman yang objektif atas prestasi pelaksanaan yang telah diukur sesuai dengan sistem pengukuran prestasi yang telah disepakati.
5. Menjadikan alat komunikasi antar bawahan dan pimpinan dalam upaya memperbaiki prestasi organisasi.

6. Mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi.
7. Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintahan.
8. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif.
9. Menunjukkan peningkatan yang perlu dilakukan.
10. Mengungkapkan permasalahan yang terjadi.

4. Aspek Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja biasanya dilakukan untuk aspek-aspek berikut ini

(Bastian 2006)

1. Aspek Finansial.

Aspek finansial meliputi anggaran atau cash flow. Aspek finansial ini sangat penting diperhatikan dalam pengukuran kinerja sehingga Dianalogikan sebagai aliran darah dalam tubuh manusia.

2. Kepuasan Pelanggan.

Dalam globalisasi perdagangan, peran dan posisi pelanggan sangat krusial dalam penentuan strategi perusahaan. Untuk itu, manajemen perlu memperoleh informasi yang relevan tentang tingkat kepuasan pelanggan.

3. Operasi dan Pasar Internal.

Informasi operasi dan mekanisme pasar internal diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan organisasi dirancang untuk pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Disamping itu, informasi operasi dan pasar internal menentukan tingkat efisiensi dan efektivitas operasi organisasi.

4. Kepuasan Pegawai.

Dalam organisasi yang banyak melakukan inovasi, peran strategis pegawai amat menentukan kelangsungan organisasi.

5. Kepuasan Komunitas dan *Stakeholders*.

Pengukuran kinerja perlu dirancang untuk mengakomodasi kepuasan para *stakeholders*.

6. Waktu

Informasi untuk pengukuran harus informasi terbaru, sehingga manfaat hasil pengukuran kinerja dapat dimaksimalkan.

Mekanisme pengukuran kinerja dapat dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Membuat komitmen dan menjalankan pengukuran kinerja.

Hal yang perlu dilakukan oleh instansi adalah sesegera mungkin membuat komitmen pengukuran kinerja, dan menjalankannya dengan tidak mengharapkan pengukuran kinerja akan langsung sempurna, untuk itu perlu dilakukan evaluasi terhadap pengukuran kinerja tersebut.

b. Perlakuan pengukuran kinerja sebagai suatu proses yang berkelanjutan.

Pengukuran kinerja merupakan suatu proses yang bersifat interaktif. Proses ini merupakan suatu cerminan upaya organisasi untuk memperbaiki kinerja.

c. Menyesuaikan proses pengukuran kinerja dengan organisasi

Organisasi harus menetapkan ukuran kinerja yang sesuai dengan bentuk dan besarnya organisasi, budaya, visi, tujuan, sasaran, dan struktur organisasi.

C. Rasio Keuangan

Analisis keuangan adalah usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan yang tersedia. Bagi perusahaan swasta (lembaga yang bersifat komersil), analisis rasio keuangan umumnya terdiri dari :

1. Rasio likuiditas, yaitu rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya dengan segera.
2. Rasio leverage, yaitu rasio yang mengukur perbandingan dana yang disediakan oleh pemilik dengan dana yang dipinjam perusahaan dari kreditur.
3. Rasio aktivitas, yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur efektif atau tidaknya perusahaan dalam menggunakan dan mengendalikan sumber yang dimiliki perusahaan.
4. Rasio profitabilitas, yaitu rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba.

Rasio-rasio tersebut perlu disusun untuk melayani pihak yang berkepentingan dengan perusahaan, yaitu:

1. Para kreditur, baik jangka pendek maupun jangka panjang, yaitu menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya.
2. Pemegang saham ataupun pemilik perusahaan, yaitu untuk menganalisis sampai sejauh mana perusahaan mampu membayar deviden ataupun memperoleh laba.
3. Pengelola, yaitu sebagai informasi yang dapat dipakai sebagai landasan dalam mengambil keputusan.

Penggunaan analisis rasio pada sektor publik khususnya terhadap APBD belum banyak dilakukan, sehingga secara teori belum ada kesepakatan secara bulat mengenai nama dan kaidah pengukurannya. Meskipun demikian, dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel. Analisis rasio terhadap APBD perlu dilaksanakan meskipun kaidah pengakuntansian dalam APBD berbeda dengan laporan keuangan yang dimiliki perusahaan swasta.

Analisis rasio keuangan pada APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Selain itu, dapat pula dilakukan dengan cara membandingkan dengan rasio keuangan yang dimiliki pemda tertentu dengan rasio keuangan daerah lain yang terdekat ataupun potensi daerahnya relatif sama untuk melihat bagaimana posisi rasio keuangan pemda tersebut terhadap pemda lainnya.

Beberapa rasio yang dapat dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari APBD antara lain rasio kemandirian (otonomi fiskal), rasio efektivitas dan efisiensi, serta *debt service coverage ratio*. (Halim 2007)

Hasil analisis rasio keuangan digunakan sebagai tolak ukur dalam :

1. Menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otoda.
2. Mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah.

3. Mengukur sejauh mana aktivitas Pemda dalam membelanjakan pendapatan daerahnya.
4. Mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah.
5. Melihat pertumbuhan dan perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu.

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak retribusi sebagai sumber pendapatan yang di perlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber yang lain, misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman (**Halim 2007**)

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat/Provinsi dan Pinjaman}}$$

Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber data ekstern. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern (terutama pemerintah pusat dan propinsi) semakin rendah, dan demikian pula sebaliknya. Rasio Kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama pendapatan asli daerah. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan

retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin tinggi.

Rasio Pendapatan Asli Daerah (Peraturan Menteri Dalam Negeri No 65 Tahun 2007) :

- Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan
- Pendapatan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah
- Pendapatan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah
- Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di pisahkan terhadap Pendapatan Asli Daerah
- Lain-lain PAD yang sah terhadap Pendapatan Asli Daerah

Rasio Pendapatan Transfer:

- Rasio Pendapatan transfer terhadap Total Pendapatan
- Rasio Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam terhadap Total Pendapatan
- Rasio Dana Alokasi Umum terhadap total Pendapatan
- Rasio Dana Alokasi Umum terhadap belanja Pegawai
- Rasio Lain-lain pendapatan terhadap total pendapatan

Rasio Belanja Transfer/Bag! hasil Pendapatan ke Kabupaten/ Kota terhadap Total Pendapatan

Rasio Kemandirian Daerah:
$$\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{(Dana Perimbangan + Pinjaman Daerah)}}$$

Tabel 2.1 Tingkat Kemandirian dan Kemampuan Keuangan Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)
Rendah Sekali	0 – 25%
Rendah	25 – 50%
Sedang	50 – 75%
Tinggi	75 – 100%

2. Rasio Efektifitas Dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah

a. Rasio Efektifitas

Menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi rill daerah (**Halim 2007**)

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD Yang Ditetapkan Berdasarkan Potensi Rill Daerah}}$$

Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100%. Namun demikian semakin tinggi rasio efektifitas, menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik. Guna memperoleh ukuran yang lebih baik, rasio efektifitas tersebut perlu dipersandingkan dengan rasio efisiensi yang dicapai pemerintah.

Tabel 2.2 Kriteria Efektivitas Keuangan Daerah

Kriteria Efektivitas	Persentase Efektifitas (%)
Sangat Efektif	>100
Efektif	>90 – 100
Cukup Efektif	>80 – 90
Kurang Efektif	>60 – 80
Tidak Efektif	60

b. Rasio Efisien

Menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja pemerintahan daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau dibawah 100%. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintahan semakin baik. Untuk itu pemerintah daerah perlu menghitung secara cermat berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh pendapatan yang diterimanya sehingga dapat diketahui apakah kegiatan pemungutan pendapatannya tersebut efisien atau tidak. Hal itu perlu dilakukan karena meskipun pemerintah daerah berhasil merealisasikan target penerimaan pendapatan sesuai dengan target yang ditetapkan, namun keberhasilan itu kurang memiliki arti apabila ternyata biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan target penerimaan pendapatannya itu lebih besar dari pada realisasi pendapatan yang diterimanya (**Halim 2007**)

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya Yang Dikeluarkan Untuk Memungut PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}$$

Tabel 2.3 Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan

Kriteria Efisiensi	Persentase Efisiensi
100% keatas	Tidak Efisien
90%-100%	Kurang Efisien
80%-90%	Cukup Efisien
60%-80%	Efisien
Kurang dari 60%	Sangat Efisien

3. Rasio Aktifitas (Rasio Kecerasan)

Rasio ini menggambarkan bagaimana pemerintahan daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Semakin tinggi presentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti presentase belanja investasi (belanja pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Secara sederhana, rasio keserasian itu dapat diformulasikan sebagai berikut (**Halim 2007**):

$$\text{Rasio Belanja Rutin Terhadap APBD} = \frac{\text{Total Belanja Rutin}}{\text{Total APBD}}$$

$$\text{Rasio Belanja Pembangunan terhadap APBD} = \frac{\text{Total Belanja Pembangunan}}{\text{Total APBD}}$$

Belum ada patokan yang pasti berapa besarnya rasio belanja rutin maupun pembangunan terhadap APBD yang ideal, karena sangat dipengaruhi oleh

dinamisasi kegiatan pembangunan dan besarnya kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan. Namun demikian, sebagai daerah yang berkembang peran pemerintah daerah untuk memacu pelaksanaan pembangunan masih relatif besar. Oleh karena itu, rasio belanja pembangunan yang relative masih kecil perlu ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan pembangunan di daerah.

Nama akun belanja rutin adalah sama dengan belanja operasi sedangkan belanja pembangunan sendiri adalah belanja modal. Dan nama akun belanja operasi dan belanja modal tercantum pada PP Nomor 24 tahun 2005.

4. Debt Service Coverage Ratio (DSCR)

Dalam rangka melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana di daerah, selain menggunakan pendapatan asli daerah, pemerintah daerah dapat menggunakan alternatif sumber dana lain, yaitu dengan melakukan pinjaman, sepanjang prosedur dan pelaksanaannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ketentuan yang menyangkut persyaratan adalah (**Halim 2007**)

- a. Jumlah kumulatif pinjaman daerah yang wajib dibayar maksimal 75% dari penerimaan APBD tahun sebelumnya.
- b. DSCR minimal 2,5%.

DSCR merupakan perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD), Bagian Daerah (BD) dari Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Penerimaan Sumber Daya Alam dan Bagian Daerah lainnya serta Dana Alokasi Umum setelah

dikurangi Belanja Wajib, dengan penjumlahan Angsuran Pokok, Bunga dan Pinjaman lainnya yang jatuh tempo.

$$\text{DSCR} = \frac{(\text{PAD}+\text{BD}+\text{DAU})-\text{BW}}{\text{Total (pokokangsuran+bunga+ biayapinjaman)}}$$

Rasio kemampuan Keuangan Daerah dihitung berdasarkan perbandingan antara proyeksi tahunan jumlah Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil *tidak termasuk Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi*, dan Dana Alokasi Umum setelah dikurangi belanja wajib dibagi dengan proyeksi penjumlahan angsuran pokok, bunga, dan biaya lain yang jatuh tempo setiap tahunnya selama jangka waktu pinjaman yang akan ditarik.(PP no 54 tahun 2005).

Yang dimaksud dengan “biaya wajib” adalah belanja pegawai dan belanja anggota DPRD.

Yang dimaksud dengan “biaya lain” yaitu antara lain biaya administrasi, biaya provisi, biaya komitmen, asuransi dan denda.

$$\text{DSCR} = \frac{(\text{PAD}+(\text{DBH}-\text{DBHDR})+\text{DAU})-\text{Belanja Wajib}}{\text{Total (pokokangsuran+bunga+biaya lain)}}$$

DSCR = Debt Service Coverage Ratio atau Rasio Kemampuan Membayar Kembali Pinjaman.

PAD = Pendapatan Asli Daerah.

DAU = Dana Alokasi Umum.

DBH = Dana Bagi Hasil.

DBHDR = Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi.

5. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan (*Growth Ratio*) mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, dapat digunakan mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu mendapatkan perhatian (**Halim 2007**)

$$\text{Rasio Pertumbuhan PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD } x_n - x_{n-1}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD } x_{n-1}}$$

$$\text{Rasio Pertumbuhan Pendapatan} = \frac{\text{Realisasi Pertumbuhan Pendapatan } x_n - x_{n-1}}{\text{Realisasi Pertumbuhan Pendapatan } x_{n-1}}$$

Keterangan:

x_n = tahun yang dihitung.

x_{n-1} = tahun sebelumnya.

D. Penelitian Terdahulu

Hasil-hasil penelitian sebelumnya dapat digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini. Beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan keuangan daerah, antara lain:

Maharani (2006) melakukan penelitian di Kantor Dinas Pendapatan Kota Batu. Jenis penelitian berupa studi kasus dan data yang digunakan adalah data sekunder berupa dokumen dan catatan Pemda Kota Batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja tingkat kemandirian Pemda Kota Batu mengalami penurunan yang berarti Pemda Kota Batu cenderung memiliki ketergantungan finansial yang sangat tinggi kepada pemerintah pusat. Hal ini dapat dilihat dari kontribusi PAD terhadap total APBD yang masih relatif kecil dan sumber pembiayaan utama masih bersumber dari dana Perimbangan Pemerintah Pusat.

Sakti (2010) meneliti tentang analisis perkembangan kemampuan keuangan daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah (studi empiris di Kabupaten Sukoharjo). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa rasio keuangan, seperti rasio kemandirian keuangan daerah, indeks kemampuan rutin, rasio keserasian, dan rasio pertumbuhan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perkembangan keuangan di Kabupaten Sukoharjo di sektor keuangan masih kurang. Untuk itu diperlukan upaya untuk peningkatan PAD, baik secara ekstensifikasi yaitu pemerintah daerah harus dapat mengidentifikasi potensi daerah sehingga peluang-peluang baru untuk sumber penerimaan daerah dapat dicari, sedangkan secara intensifikasi dengan memperbaiki kinerja pengelolaan pemungutan pajak.

Yanti (2011) meneliti tentang analisis rasio sebagai indikator kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Soppeng. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa analisis rasio untuk mengukur indikator kinerja keuangan daerah, seperti rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektifitas dan efisiensi pendapatan asli daerah, rasio aktivitas (rasio keserasian), debt service coverage ratio (DSCR), dan rasio pertumbuhan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan Pemda Kabupaten Soppeng dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan masyarakat dapat dikatakan memiliki kinerja yang positif.

Yuniarti (2011) meneliti tentang analisis kemampuan keuangan daerah Kabupaten Situbondo di era otonomi daerah tahun 2001-2010. Dalam penelitian ini ada beberapa indikator yang digunakan sebagai alat analisis seperti rasio kemampuan keuangan daerah, rasio indeks kemampuan rutin, dan rasio pertumbuhan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Kabupaten Situbondo mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan. Namun, rasio kemampuan keuangan daerah dan indeks kemampuan rutin masih kurang dari yang diharapkan.

Fitriyah Agustin (2007) dengan judul “Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar)”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Kinerja Keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar ditinjau dari Rasio APBD. Ada 2 metode yang digunakan yaitu metode Time Series yang terdiri dari Rasio Kemandirian, Rasio Aktivitas, dan Rasio Pertumbuhan. Metode Cross Section terdiri dari beberapa rasio seperti :

Rasio Efektivitas dan Efisiensi PAD, Rasio Debt Service Coverage Ratio. Kemudian dari penelitian ini disimpulkan bahwa berdasar Rasio Keuangan APBD maka Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah baik jika dilihat dari Rasio Pertumbuhan dan Rasio DSCR. Namun dapat dikatakan kurang baik apabila dilihat dari Rasio Kemandirian, Rasio Aktifitas dan Rasio Efektivitas dan Rasio Efisiensi PAD. Pemerintah daerah belum bisa menjalankan tugasnya secara efektif dan efisien karena masih banyak rasio-rasio yang menunjukkan kurangnya Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Blitar dalam mengelola sumber dana yang dimilikinya. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah metode penelitiannya yaitu menggunakan metode deskriptif kuantitatif.

Perbedaannya adalah di penelitian ini tidak menggunakan Rasio Keserasian, sedangkan pada penelitian penulis ada. Perbedaan lainnya adalah waktu dan lokasi penelitian dimana penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2007 di Kabupaten Blitar Jawa Timur, sedangkan penelitian penulis dilaksanakan di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah pada tahun 2015.

Jusmawati (2011) dengan judul “Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng terhadap Efisiensi Pendapatan Asli Daerah”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran kinerja keuangan daerah Pemkab Soppeng, gambaran efisiensi PAD Pemkab Soppeng selama tahun 2003-2010, dan

Kinerja keuangan daerah Pemkab Soppeng berpengaruh signifikan terhadap efisiensi penggunaan PAD. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan Kinerja keuangan daerah Pemkab Soppeng dalam delapan tahun terakhir terbukti baik. Hal

ini dapat dilihat melalui perhitungan rasio kemandirian, rasio efektivitas, dan rasio pertumbuhan dari tahun 2003-2010. Kemudian efisiensi PAD Pemkab Soppeng dalam delapan tahun terakhir terbukti efisien. Secara parsial, rasio kemandirian Pemkab Soppeng berpengaruh signifikan terhadap efisiensi PAD pada delapan tahun terakhir (2003-2010). Secara parsial, rasio efektivitas Pemkab Soppeng tidak berpengaruh signifikan terhadap efisiensi PAD pada delapan tahun terakhir (2003-2010). Secara parsial, rasio pertumbuhan Pemkab Soppeng tidak berpengaruh signifikan terhadap efisiensi PAD pada delapan tahun terakhir (2003-2010). Secara simultan, rasio kemandirian, rasio efektivitas, dan rasio pertumbuhan berpengaruh signifikan terhadap efisiensi PAD pada delapan tahun terakhir (2003-2010). Kesamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah jenis penelitian dan metode pengumpulan datanya di mana keduanya sama-sama menggunakan metode deskriptif kuantitatif dan pengumpulan datanya menggunakan metode wawancara, dokumentasi, dan penelitian kepustakaan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada waktu dan tempat penelitian. Jika penelitian ini bertempat di Kabupaten Soppeng tahun 2011, sedangkan penelitian penulis bertempat di Kabupaten Kebumen tahun 2015.

Bahrn Assidiqi (2014) dengan judul "Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Klaten Tahun 2008-2012". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kinerja Keuangan Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten tahun 2008-2012. Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan oleh Bahrn Assidiqi ini menunjukkan Kinerja Keuangan Kabupaten Klaten tahun 2008-2012 secara umum dapat dikatakan baik, meskipun

tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat semakin tinggi dan pemungutan pajak daerah masih belum efisien. Hasil Kinerja Keuangan Belanja Daerah secara umum dapat dikatakan baik, tetapi dalam keserasian belanja belum terjadi keseimbangan antara Belanja Operasi dengan Belanja Modal. Kesamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah jenis penelitian dan metode pengumpulan datanya di mana keduanya sama-sama menggunakan metode deskriptif kuantitatif dan pengumpulan data nya menggunakan metode wawancara, dokumentasi, dan penelitian kepustakaan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada waktu dan tempat penelitian. Jika penelitian ini bertempat di Kabupaten Klaten tahun 2014, sedangkan penelitian penulis bertempat di Kabupaten Kebumeh tahun 2015.

Tabel 2.4 Penelitian Terdahulu

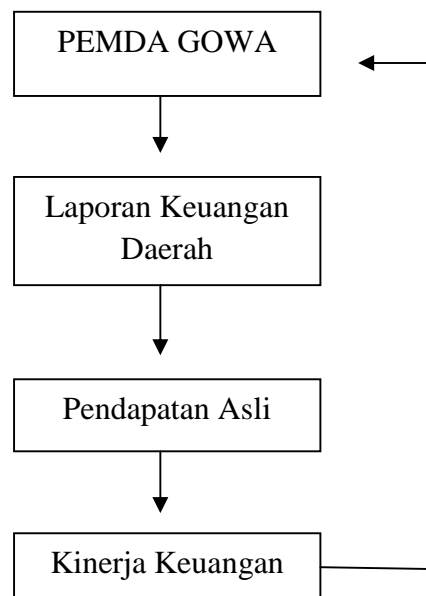
N	Nama	Judul	Metode	Hasil Penelitian
1.	Peneliti Maharani (2006)	Analisis Kinerja Tingkat Kemandirian Pemda Kota Batu	Analisis Metode Deskriptif	Kinerjatingkat kemandirian Pemda Kota Batu rasio kemandirian mengalami penurunan yang berarti Pemda Kota Batu cenderung memiliki ketergantungan financial yang sangat tinggi kepada pemerintah pusat.
2.	Sakti (2010)	Analisis Perkembangan	Metode Deskriptif	Perkembangan keuangan di Kabupaten Sukoharjo di sector keuangan masih

		Kemampuan Keuangan Daerah dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah (studi empiris di Kabupaten Sukoharjo).		kurang.
3.	Yanti (2011)	Analisis Rasio Sebagai Indikator kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Soppeng.	Metode Deskriptif	kemampuan Pemda Kabupaten Soppeng dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan masyarakat dapat dikatakan memiliki kinerja yang positif.
4.	Yuniarti (2011)	Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Situbondo di Era Otonomi Daerah Tahun 2001-2010.	Metode Deskriptif	Kabupaten Situbondo mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan. Namun, rasio kemampuan keuangan daerah dan indeks kemampuan rutin masih kurang dari yang diharapkan.
5.	Fitriyah Agustin (2007)	Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar)	1. Metode Time Series 2. Metode Cross Section	Pemerintah daerah belum bisa menjalankan tugasnya secara efektif dan efisien karena masih banyak rasio-rasio yang menunjukkan kurangnya Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Blitar dalam mengelola sumber dana yang dimilikinya.

6.	Jusmawati (2011)	Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng terhadap Efisiensi Pendapatan Asli Daerah	Metode Deskriptif Kuantitatif	Kinerja keuangan daerah Pemkab Soppeng dalam delapan tahun terakhir terbukti baik.
7.	BahrunAssidiqi (2014)	Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Klaten Tahun 2008-2012	Metode Deskriptif Kuantitatif	Kinerja Keuangan Kabupaten Klaten tahun 2008-2012 secara umum dapat dikatakan baik, meskipun tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat semakin tinggi dan pemungutan pajak daerah masih belum efisien.

E. Kerangka Pikir

Alur pemikiran tersebut sebagai berikut :



F. Hipotesis

Untuk kepentingan penelitian ini, sesuai dengan tujuannya di ajukan hipotesis pengarah sebagai berikut :

1. Diduga pendapatan asli daerah sangat berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan selama 2 bulan yaitu dari bulan juli sampai September.

B. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan berdasarkan metode :

1. Penelitian Lapangan (*field research*)

Yaitu penelitian yang dilakukan langsung di instansi pemerintahan dalam hal ini melalui Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa, dengan wawancara dengan pihak terkait.

2. Tinjauan Kepustakaan (*library research*).

Yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca dan mempelajari literatur yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. hal ini dimaksudkan untuk memperoleh landasan teori tentang permasalahan yang akan dibahas.

3. Mengakses website atau situs-situs yang menyediakan informasi yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini.

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data kualitatif yaitu data yang diperoleh dari wawancara dengan pihak-pihak yang terkait baik maupun pihak lain yang dianggap berkompeten dalam memberikan informasi yang dibutuhkan penulis.
2. Data kuantitatif yaitu berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa tahun anggaran 2014-2016 serta data data lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.

Sumber data dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian lapangan (*Field Research*) pada instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa yang berhubungan dengan penelitian.
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari pihak lain maupun sumber lain yang berkaitan dengan penelitian.

D. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif (*descriptive kuantitative analysis method*), yaitu dengan menetapkan konsep perhitungan Rasio Keuangan dalam pengukuran kinerja keuangan, dengan menghitung *Rasio Keuangan* dari realisasi anggaran yang tertuang dalam APBD dan Laporan Realisasi Anggaran untuk tahun Anggaran 2014-2016 yang dilakukan dengan cara:

A. Menghitung Rasio Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa, dengan menggunakan rasio-rasio berikut:

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Untuk mengetahui tingkat kemandirian keuangan daerah yang dapat mencerminkan kemampuan pemerintah daerah membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Dengan dasar perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat/ Provinsi dan pinjaman}}$$

2. Rasio Efektifitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah

a. Rasio Efektifitas

Untuk mengetahui tingkat efektifitas pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah dengan dasar perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD Yang Ditetapkan Berdasarkan Potensi Rill Daerah}}$$

b. Rasio Efisiensi

Untuk mengetahui tingkat efisiensi kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan. Dengan dasar perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya Yang Dikeluarkan Untuk Memungut PAD}}{\text{Penerimaan PAD}}$$

3. Rasio Aktifitas (Rasio Kecerahan)

Untuk mengetahui apakah pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Secara sederhana, rasio kecerahan itu dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Rutin Terhadap APBD} = \frac{\text{Total Belanja Rutin}}{\text{Total APBD}}$$

$$\text{Rasio Belanja Pembangunan terhadap APBD} = \frac{\text{Total Belanja Pembangunan}}{\text{Total APBD}}$$

4. Debt Service Coverage Ratio (DSCR)

Untuk mengetahui tingkat kemampuan pemerintah daerah dalam membayar pinjaman/hutang. Dengan dasar perhitungan sebagai berikut:

$$\text{DSCR} = \frac{(\text{PAD} + \text{BD} + \text{DAU}) - \text{BW}}{\text{Total (pokokangsuran + bunga + biaya pinjaman)}}$$

Dimana:

PAD = Pendapatan Asli Daerah

BD = Bagian Daerah

DAU = Dana Alokasi Umum

BW = Belanja Wajib

5. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan ini mengukur seberapa besar tingkat kemampuan Pemda dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapainya dari periode ke periode berikutnya. Dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, dapat digunakan mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu mendapatkan perhatian.

$$\text{Rasio Pertumbuhan PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD } x_n - x_{n-1}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD } x_{n-1}}$$

$$\text{Rasio Pertumbuhan Pendapatan} = \frac{\text{Realisasi Pertumbuhan Pendapatan } x_n - x_{n-1}}{\text{Realisasi Pertumbuhan Pendapatan } x_{n-1}}$$

Keterangan:

x_n = tahun yang dihitung

x_{n-1} = tahun sebelumnya

- B. Melakukan penilaian kinerja secara keseluruhan yang dicapai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa yang dilihat dari hasil perhitungan rasio keuangannya.

E. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Agar penelitian ini dapat dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan, maka perlu dipahami berbagai unsur-unsur yang menjadi dasar dari suatu penelitian ilmiah yang termuat dalam operasional variabel penelitian. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah yang mencakup beberapa parameter berupa rasio, yaitu sebagai berikut :

1. Rasio Efektivitas PAD

Rasio Efektivitas PAD menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi Rasio Efektivitas PAD, maka semakin baik kinerja pemerintah daerah. Rumusnya sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$$

2. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD) menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio ini adalah :

$$\text{REKD} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

3. Rasio Keserasian

Rasio Keserasian menggambarkan bagaimana pemerintahan daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja operasi dan belanja modal secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja operasi berarti persentase belanja modal yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Secara sederhana, rasio keserasian itu dapat diformulasikan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

4. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan mengukur seberapa besar kemampuan Pemerintah Daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari periode satu ke periode berikutnya, baik dilihat dari sumber pendapatan maupun pengeluaran. Rumus untuk menghitung Rasio Pertumbuhan adalah sebagai berikut :

$$r = \frac{P_n - P_o}{P_o}$$

Keterangan :

r = Rasio Pertumbuhan

P_n = Total Pendapatan Daerah/PAD/ Belanja Modal/ Belanja Operasi yang dihitung pada tahun ke-n

$P_0 = \frac{\text{Total Pendapatan Daerah/PAD/ Belanja Modal/ Belanja Operasi}}{\text{yang dihitung pada tahun ke-0(tahun sebelum n)}}$

5. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

Rumus Rasio Kemandirian Keuangan Daerah adalah sebagai berikut :

$$\text{RKKD} = \frac{\text{PAD}}{\text{Pendapatan Transfer}} \times 100\%$$

BAB IV

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

4.1 Tentang Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa

4.1.1 Sejarah Singkat Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa

Dalam khasanah sejarah nasional, nama Gowa sudah tidak asing lagi. Mulai abad ke-15, Kerajaan Gowa merupakan kerajaan maritim yang besar pengaruhnya di perairan Nusantara. Bahkan dari kerajaan ini juga muncul nama pahlawan nasional yang bergelar Ayam Jantan dari Timur, Sultan Hasanuddin, Raja Gowa XVI yang berani melawan VOC Belanda pada tahun-tahun awal kolonialisasinya di Indonesia. Kerajaan Gowa memang akhirnya takluk kepada Belanda lewat Perjanjian Bungaya. Namun meskipun sebagai kerajaan, Gowa tidak lagi berjaya, kerajaan ini mampu memberi warisan terbesarnya, yaitu Pelabuhan Makassar. Pelabuhan yang kemudian berkembang menjadi Kota Makassar ini dapat disebut anak kandungnya, sedangkan Kerajaan Gowa sendiri merupakan cikal bakal Kabupaten Gowa sekarang.

Kota Makassar lebih dikenal khalayak dibandingkan dengan Kabupaten Gowa. Padahal kenyataannya sampai sekarang Kabupaten Gowa ibaratnya masih menjadi ibu bagi kota ini. Kabupaten yang hanya berjarak tempuh sekitar 10 menit dari Kota Makassar ini memasok sebagian besar kebutuhan dasar kehidupan kota. Mulai dari bahan material untuk pembangunan fisik, bahan pangan, terutama sayur-mayur, sampai aliran air bersih dari Waduk Bili-bili.

Kemampuan Kabupaten Gowa menyuplai kebutuhan bagi daerah sekitarnya dikarenakan keadaan alamnya. Kabupaten seluas 1.883,32 kilometer persegi ini memiliki enam gunung, di mana yang tertinggi adalah Gunung Bawakaraeng. Daerah ini juga dilalui Sungai Jeneberang yang di daerah pertemuannya dengan Sungai Jenelata dibangun Waduk Bili-bili. Keuntungan alam ini menjadikan tanah Gowa kaya akan bahan galian, di samping tanahnya subur.

MASA KERAJAAN

Pada tahun 1320 Kerajaan Gowa terwujud atas persetujuan kelompok kaum yang disebut Kasuwiyang-Kasuwiyang dan merupakan kerajaan kecil yang terdiri dari 9 Kasuwiyang yaitu Kasuwiyang Tombolo, Lakiyung, Samata, Parang-parang, Data, Agang Je'ne, Bisei, Kalling, dan Sero.

Pada masa sebagai kerajaan, banyak peristiwa penting yang dapat dibanggakan dan mengandung citra nasional antara lain Masa Pemerintahan I Daeng Matanre Karaeng Imannuntungi Karaeng Tumapa'risi Kallonna berhasil memperluas Kerajaan Gowa melalui perang dengan menaklukkan Garassi, Kalling, Parigi, Siang (Pangkaje'ne), Sidenreng, Lempangang, Mandalle dan lain-lain kerajaan kecil, sehingga Kerajaan Gowa meliputi hampir seluruh dataran Sulawesi Selatan.

Di masa kepemimpinan Karaeng Tumapa'risi Kallonna tersebutlah nama Daeng Pamatte selaku Tumailalang yang merangkap sebagai Syahbandar, telah berhasil menciptakan aksara Makassar yang terdiri dari 18 huruf yang disebut Lontara Turiolo.

Pada tahun 1051 H atau tahun 1605 M, Dato Ribandang menyebarkan Agama Islam di Kerajaan Gowa dan tepatnya pada tanggal 9 Jumadil Awal tahun 1051 H atau 20 September 1605 M, Raja I Mangerangi Daeng Manrabia menyatakan masuk agama Islam dan mendapat gelar Sultan Alauddin. Ini kemudian diikuti oleh Raja Tallo I Mallingkaang Daeng Nyonri Karaeng Katangka dengan gelar Sultan Awwalul Islam dan beliaulah yang mempermaklumkan shalat Jum'at untuk pertama kalinya.

Raja I Mallombasi Daeng Mattawang Karaeng Bontomangape Muhammad Bakir Sultan Hasanuddin Raja Gowa ke XVI dengan gelar Ayam Jantan dari Timur, memproklamkan Kerajaan Gowa sebagai kerajaan maritim yang memiliki armada perang yang tangguh dan kerajaan terkuat di Kawasan Indonesia Timur.

Pada tahun 1653 – 1670, kebebasan berdagang di laut lepas tetap menjadi garis kebijaksanaan Gowa di bawah pemerintahan Sultan Hasanuddin. Hal ini mendapat tantangan dari VOC yang menimbulkan konflik dan persetujuan yang mencapai puncaknya saat Sultan Hasanuddin menyerang posisi Belanda di Buton.

Akibat peperangan yang terus menerus antara Kerajaan Gowa dengan VOC mengakibatkan jatuhnya kerugian dari kedua belah pihak, oleh Sultan Hasanuddin melalui pertimbangan kearifan dan kemanusiaan guna menghindari banyaknya kerugian dan pengorbanan rakyat, maka dengan hati yang berat menerima permintaan damai VOC.

Pada tanggal 18 November 1667 dibuat perjanjian yang dikenal dengan Perjanjian Bungaya (Cappaya ri Bungaya). Perjanjian tidak berjalan langgeng karena pada tanggal 9 Maret 1668, pihak Kerajaan Gowa merasa dirugikan. Raja Gowa kembali dengan heroiknya mengangkat senjata melawan Belanda yang berakhir dengan

jatuhnya Benteng Somba Opu secara terhormat. Peristiwa ini mengakar erat dalam kenangan setiap patriot Indonesia yang berjuang gigih membela tanah airnya.

Sultan Hasanuddin bersumpah tidak sudi bekerja sama dengan Belanda dan pada tanggal 1 Juni 1669 meletakkan jabatan sebagai Raja Gowa ke XVI setelah hampir 16 tahun melawan penjajah. Pada hari Kamis tanggal 12 Juni 1670 Sultan Hasanuddin mangkat dalam usia 36 tahun. Berkat perjuangan dan jasa-jasanya terhadap bangsa dan negara, maka dengan Surat Keputusan Presiden RI Nomor 087/TK/Tahun 1973 tanggal 16 Nopember 1973, Sultan Hasanuddin dianugerahi penghargaan sebagai Pahlawan Nasional.

A. ARTI DAN MAKNA LAMBANG KABUPATEN GOWA



1. Dasar lambang warna putih melambangkan tanda suci dengan itikad yang luhur untuk mencapai cita-cita bangsa yaitu masyarakat adil dan makmur yang diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa.
2. Bentuk bingkai persegi lima warna hitam adalah melambangkan Pancasila Dasar dan Falsafah Negara Republik Indonesia.
3. Buah padi berwarna kuning emas dan buah kapas berwarna putih melingkari bingkai persegi lima, perlambang kemakmuran.

4. Bagian depan terdapat tangga berwarna hitam bertuliskan Gowa dengan huruf latin warna putih menghubungkan buah padi dan kapas, perlambang Gowa siap melaksanakan pembangunan yang bertahap.
5. Depan benteng nampak terpancang dua buah meriam warna merah, dimukanya bertengger seekor ayam jantan berwarna putih berjengger merah sedang berkokok, perlambang kepahlawanan nasional Sultan Hasanuddin yang berasal dari Gowa.
6. Di tengah-tengah berdiri sebatang pohon lontar, berwarna hitam, buah sembilan biji berwarna merah, perlambang kebudayaan Gowa sebagai bagian dari kebudayaan nasional.
7. Latar belakang lambang nampak sinar warna kuning emas dengan pancaran tujuh belas, perlambang Proklamasi 17 Agustus dan daun nyiur melambai, perlambang tanah airku Indonesia.

Kondisi Lingkungan & Geografis Kabupaten Gowa

B. GEOGRAFIS KAB. GOWA



Kabupaten Gowa berada pada 12°38.16' Bujur Timur dari Jakarta dan 5°33.6' Bujur Timur dari Kutub Utara. Sedangkan letak wilayah administrasinya antara 12°33.19' hingga 13°15.17' Bujur Timur dan 5°5' hingga 5°34.7' Lintang Selatan dari Jakarta.

Kabupaten yang berada pada bagian selatan Provinsi Sulawesi Selatan ini berbatasan dengan 7 kabupaten/kota lain, yaitu di sebelah Utara berbatasan dengan Kota Makassar dan Kabupaten Maros. Di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sinjai, Bulukumba, dan Bantaeng. Di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Takalar dan Jeneponto sedangkan di bagian Barat berbatasan dengan Kota Makassar dan Takalar.

Luas wilayah Kabupaten Gowa adalah 1.883,33 km² atau sama dengan 3,01% dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Wilayah Kabupaten Gowa terbagi dalam 18 Kecamatan dengan jumlah Desa/Kelurahan definitif sebanyak 167 dan 726 Dusun/Lingkungan. Wilayah Kabupaten Gowa sebagian besar berupa dataran tinggi berbukit-bukit, yaitu sekitar 72,26% yang meliputi 9 kecamatan yakni Kecamatan Parangloe, Manuju, Tinggimoncong, Tombolo Pao, Parigi, Bungaya, Bontolempangan, Tompobulu dan Biringbulu. Selebihnya 27,74% berupa dataran rendah dengan topografi tanah yang datar meliputi 9 Kecamatan yakni Kecamatan Somba Opu, Bontomarannu, Pattallassang, Pallangga, Barombong, Bajeng, Bajeng Barat, Bontonompo dan Bontonompo Selatan.

Dari total luas Kabupaten Gowa, 35,30% mempunyai kemiringan tanah di atas 40 derajat, yaitu pada wilayah Kecamatan Parangloe, Tinggimoncong,

Bungaya, Bontolempangan dan Tompobulu. Dengan bentuk topografi wilayah yang sebahagian besar berupa dataran tinggi, wilayah Kabupaten Gowa dilalui oleh 15 sungai besar dan kecil yang sangat potensial sebagai sumber tenaga listrik dan untuk pengairan. Salah satu diantaranya sungai terbesar di Sulawesi Selatan adalah sungai Jeneberang dengan luas 881 Km² dan panjang 90 Km.

Di atas aliran sungai Jeneberang oleh Pemerintah Kabupaten Gowa yang bekerja sama dengan Pemerintah Jepang, telah membangun proyek multifungsi DAM Bili-Bili dengan luas + 2.415 Km² yang dapat menyediakan air irigasi seluas + 24.600 Ha, konsumsi air bersih (PAM) untuk masyarakat Kabupaten Gowa dan Makassar sebanyak 35.000.000 m³ dan untuk pembangkit tenaga listrik tenaga air yang berkekuatan 16,30 Mega Watt.

Seperti halnya dengan daerah lain di Indonesia, di Kabupaten Gowa hanya dikenal dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Biasanya musim kemarau dimulai pada Bulan Juni hingga September, sedangkan musim hujan dimulai pada Bulan Desember hingga Maret. Keadaan seperti itu berganti setiap setengah tahun setelah melewati masa peralihan, yaitu Bulan April-Mei dan Oktober-Nopember.

Curah hujan di Kabupaten Gowa yaitu 237,75 mm dengan suhu 27,125°C. Curah hujan tertinggi yang dipantau oleh beberapa stasiun/pos pengamatan terjadi pada Bulan Desember yang mencapai rata-rata 676 mm, sedangkan curah hujan terendah pada Bulan Juli - September yang bisa dikatakan hampir tidak ada hujan.

4.2 Struktur Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa

Berikut susunan struktur baru SKPD Pemkab Gowa:

Staf Ahli

Staf Ahli Bidang Pemerintahan

Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan

Staf Ahli Bidang Kesra dan Sosial

Asisten

Asisten Pemerintahan dan Kesra

Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Asisten Administrasi Umum

Dinas

Kepala Dinas Kesehatan

Kepala Dinas PU dan Penataan Ruang

Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan

Kepala Dinas Sosial

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran

Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kepala Dinas Perhubungan

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Kepala Dinas Koperasi dan UKM

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan

Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kepala Dinas Pendidikan

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga

Kepala Dinas Ketahanan Pangan

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Badan

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kepala Badan Pendapatan Daerah

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM

Kepala badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kepala Satpol PP

Inspektur Kabupaten Gowa

Sekwan

BAB V

PEMBAHASAN

5.1 Ringkasan Target Dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran

2014-2016 Pemerintah Kabupaten Gowa.

Nomor	Uraian	Realisasi 2014	Realisasi 2015	Realisasi 2016
1	Pendapatan			
1.1	Pendapatan Asli Daerah	20.398.764.209	21.418.839.483	17.343.783.489
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	3.899.805.010	3.730.536.863	3.528.263.511
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	8.149.220.402	9.148.255.176	8.166.122.770
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	335.337.028	610.098.232	557.423.188
1.1.4	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	8.014.401.768	7.929.949.210	5.091.974.020
1.2	Pendapatan Transfer	486.042.272.291	493.870.168.227	576.001.974.274
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	452.169.858.611	471.417.436.551	467.675.344.504
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	30.157.094.625	29.981.229.697	31.683.133.078
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	2.483.499.986	857.145.854	1.847.466.426
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum	363.390.164.000	370.482.061.000	383.218.545.000
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	56.139.100.000	70.097.000.000	50.926.200.000
1.2.2	Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya	23.195.408.000	11.924.850.000	94.250.948.113
1.2.2.1	Dana Otonomi Khusus	0	0	0
1.2.2.2	Dana Penyesuaian	23.195.408.000	11.924.850.000	94.250.948.113
1.2.3	Transfer Pemerintah Provinsi	10.667.005.680	10.527.881.676	14.075.681.657
1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	10.677.005.680	10.527.881.676	14.075.681.657
1.2.3.2	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	0	0	0

1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	12.628.031.198	11.474.445.754	13.503.818.532
1.3.1	Pendapatan Hibah	0	0	0
1.3.2	Pendapatan Dana darurat	0	0	0
1.3.3	Pendapatan Lainnya	12.628.031.198	11.474.445.754	13.503.818.532
	Jumlah	519.069.067.698	526.763.453.464	606.849.576.296
2	Belanja Daerah			
2.1	Belanja Operasi	389.126.144.860	418.423.506.141	496.282.699.295
2.1.1	Belanja Pegawai	276.692.936.140	310.185.151.325	365.059.030.340
2.1.2	Belanja Barang	80.150.328.501	85.734.232.572	90.087.552.429
2.1.3	Belanja Bunga	536.747.560	0	0
2.1.4	Belanja Subsidi	0	0	0
2.1.5	Belanja Hibah	1.900.000.000	4.750.000.000	23.897.776.116
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	12.137.015.799	3.738.020.813	1.034.970.197
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	17.709.062.860	14.016.101.431	16.203.370.213
2.2	Belanja Modal	152.911.613.904	120.856.244.770	99.857.780.515
2.2.1	Belanja Tanah	674.630.000	946.677.199	116.320.000
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	28.152.378.152	12.416.562.018	9.905.831.435
2.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	32.951.010.548	50.521.674.991	17.407.569.794
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	86.164.440.104	56.836.040.062	72.346.398.436
2.2.5	Belanja Aset tetap Lainnya	4.534.155.100	135.290.500	81.660.850
2.2.6	Balanga Aset Lainnya	0	0	0
2.3	Belanja Tak Terduga	0	892.500	0
2.3.1	Belanja Tak Terduga	0	892.500	0
2.4	Transfer	0	488.486.790	499.083.354
2.4.1	Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota	0	488.486.790	499.083.354
2.4.2	Bagi Hasil Retribusi ke Kabupaten/Kota	0	0	0
2.4.3	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kabupaten/Kota	0	0	0
	Jumlah Belanja + Transfer	542.037.758.764	539.769.130.201	596.639.563.164
	Surplus /(Defisit)	-22.968.691.065	-13.005.676.756	10.210.013.132
3	Pembiayaan Daerah			

3.1	Penerimaan Pembiayaan			
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)	74.517.185.182	40.706.210.386	31.596.631.086
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0	0	0
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	115.819.001	2.090.229.478	100.616.173
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	155.420.010	42.083.291	14.368.110
3.1.7	Penerimaan Hutang Belanja	1.116.095.148	3.051.287.215	0
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	75.904.519.341	45.889.810.371	31.711.615
3.2	Pengeluaran Pembiayaan			
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	808.211.189	0	0
3.2.3	Investasi Dana Bergulir	0	0	0
3.2.4	Pembayaran Pokok Utang	11.421.406.700	1.142.375.148	1.196.616.630
3.2.5	Pemberian Pinjaman Daerah	0	145.127.400	0
3.2.6	Pembayaran Utang Belanja	0	0	0
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	12.229.617.889	1.287.502.548	1.196.616.630
	Pembiayaan Netto	63.674.901.451	44.602.307.823	30.514.998.739
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Berkenaan (SiLPA)	40.706.210.386	31.596.631.086	40.725.011.871

5.2 Perhitungan Rasio Keuangan Daerah pada Kabupaten Gowa

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan bersinambungan untuk menilai keberhasilan dan ketidakberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran, dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi, dan strategi instansi pemerintahan. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan ketidakberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran.

Dalam mengukur kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa, ada beberapa rasio yang dapat digunakan. Untuk lebih jelasnya akan dipaparkan dalam pembahasan sebagai berikut:

1. Rasio Kemandirian Daerah

Kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber data ekstern.

1. Rasio Kemandirian Tahun Anggaran 2014

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Pendapatan Transfer Dana + Pinjaman}}$$

$$= \frac{20.398.764.209,46}{486.042.272.291,00 + 0} \times 100\%$$

$$= 4,19 \%$$

2. Rasio Kemandirian Tahun Anggaran 2015

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Pendapatan Transfer Dana + Pinjaman}}$$

$$= \frac{21.418.839.483,39}{493.870.168.227,00 + 0} \times 100\%$$

$$= 4,33 \%$$

3. Rasio Kemandirian Tahun Anggaran 2016

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Pendapatan Transfer Dana + Pinjaman}}$$

$$= \frac{17.343.783.489,88}{576.001.974.274,35 + 0} \times 100 \%$$

$$= 3,01 \%$$

2. Rasio Efektifitas dan Efisiensi

Menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi rill daerah. Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100%. Namun demikian semakin tinggi rasio efektifitas, menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik.

Rasio efektifitas Pemerintah Kabupaten Gowa dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD Yang Ditetapkan Berdasarkan Potensi Rill Daerah}}$$

Untuk memperoleh ukuran yang lebih baik, rasio efektifitas perlu diperbandingkan dengan rasio efisiensi yang dicapai pemerintah. Rasio efisiensi menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja pemerintah dikatakan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 atau dibawah 100 persen. Semakin kecil rasio efisien menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik.

Rasio efisiensi Pemerintah Kabupaten Gowa dihitung sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya Yang Dikeluarkan Untuk Memungut PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}$$

**Tabel 5.1 Target dan Realisasi Tahun Penerimaan Pendapatan Asli Daerah
Tahun Anggaran 2014-2016**

Keterangan	2014	2015	2016
Target Penerimaan PAD	32.797.480.272,00	35.974.314.248,00	52.606.038.817,00
Realisasi Penerimaan PAD	20.398.764.209,46	21.418.839.483,39	17.343.783.489,88
Biaya Pemungutan PAD	435.297.722,00	580.887.744,00	375.522.395,00
Rasio Efektivitas	62,19 %	59 ,53%	32 ,96%
Rasio Efisiensi	2,13 %	2,71 %	2,16 %

$$\begin{aligned} \text{a) Rasio Efektivitas 2014} &= \frac{20.398.764.209,46}{32.797.480.272,00} \times 100\% \\ &= 62,19 \% \end{aligned}$$

$$\text{Rasio Efektifitas 2015} = \frac{21.418.839.483,39}{35.974.314.248,00} \times 100\%$$

$$= 59,53\%$$

$$\text{Rasio Efektifitas 2016} = \frac{17.343.783.489,88}{52.606.038.817,00} \times 100\%$$

$$= 32,96\%$$

$$\text{b) Rasio Efisiensi 2014} = \frac{435.297.722,00}{20.398.764.209,46} \times 100\%$$

$$= 2,13 \%$$

$$\text{Rasio Efisiensi 2015} = \frac{580.887.744,00}{21.418.839.483,39} \times 100\%$$

$$= 2,71\%$$

$$\text{Rasio Efisiensi 2016} = \frac{375.522.395,00}{17.343.783.489,88} \times 100\%$$

$$= 2,16\%$$

3. Rasio Aktivitas (Rasio Keserasian)

Rasio ini menggambarkan bagaimana pemerintahan daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Semakin tinggi presentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti presentase belanja investasi (belanja pembangunan) yang digunakan untuk

menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Rasio ini dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Rutin Terhadap APBD} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total APBD}}$$

$$\text{Rasio Belanja Pembangunan terhadap APBD} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total APBD}}$$

**Tabel 5.2 Perhitungan Rasio Aktivitas Pemerintah Kabupaten Gowa
Tahun Anggaran 2014-2016**

Keterangan	2014	2015	2016
Belanja Operasi	389.126.144.860,40	418.423.506.141,00	496.282.699.295,00
Belanja Modal	152.911.613.904,00	120.856.244.770,00	99.857.780.515,00
Rasio Belanja Operasi	71,78%	77,51%	83,17 %
Rasio Belanja Modal	28,21 %	22,39 %	16,73 %

1. Rasio Aktivitas tahun 2014 :

$$\text{a. Belanja Operasi} = \frac{389.126.144.860,40}{542.037.871.764,40} \times 100\%$$

$$= 71,78 \%$$

$$\text{b. Belanja Modal} = \frac{152.911.726.904,00}{524.037.871.764,40} \times 100\%$$

$$= 28,21\%$$

2. Rasio Aktivitas 2015 :

$$\text{a. Belanja Operasi} = \frac{418.423.506.141,00}{539.769.130.201,00} \times 100\%$$

$$= 77,51\%$$

$$\text{b. Belanja Modal} = \frac{120.856.244.770,00}{539.769.130.201,00} \times 100\%$$

$$= 22,39 \%$$

3. Rasio Aktivitas 2016 :

$$\text{a. Belanja Operasi} = \frac{496.282.699.295,00}{596.639.563.164,00} \times 100\%$$

$$= 83,17 \%$$

$$\text{b. Belanja Modal} = \frac{99.857.780.515,00}{596.639.563.164,00} \times 100\%$$

$$= 16,73 \%$$

4. Debt Service Coverage Ratio

Selain menggunakan pendapatan asli daerah, pemerintah daerah dapat menggunakan alternatif sumber dana lain, yaitu dengan melakukan pinjaman, sepanjang prosedur dan pelaksanaannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Debt Service Coverage Ratio (DSCR) Kabupaten Gowa dapat dihitung sebagai berikut :

$$DSCR = \frac{(PAD+BD+DAU)- BW}{\text{Total (pokok angsuran+bunga+ biaya pinjaman)}}$$

Tabel 5.3 Perhitungan *Debt Service Coverage Ratio* Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2014-2016

No	Keterangan	2014	2015	2016
1.	Pendapatan Asli Daerah	20.398.764.209,46	21.418.839.483,39	17.343.783.489,88
2.	Bagi Hasil Pajak /bukan Pajak	32.639.594.611,00	30.838.375.551,00	33.530.599.504,00
3.	Dana Alokasi Umum	363.390.164.000,00	370.482.061.000,00	383.218.545.000,00
4.	Belanja Pegawai	389.126.144.860,40	310.185.151.325,00	365.059.030.340,00
5.	Belanja Anggota DPRD	2.349.600.000,00	1.253.085.000,00	2.313.080.000,00
6.	Bunga	536.747.560,40	-	-
7.	Pokok	-	1.142.375.148,00	1.196.616.630,00

	Angsusan			
8.	DSCR	1,26%	9,74 %	5,57 %

$$\begin{aligned}
 & (2.398.764.209,46+32.640.594.611,00+363.390.164.000,00) \\
 1. \text{ DSCR 2014} & = \frac{- (389.126.144.860,40+ 2.349.600.000,00)}{536.747.560,40} \\
 & = 1,29\% \\
 & (20.418.839.483,39+30.838.375.551,00+370.482.061.000,00) \\
 2. \text{ DSCR 2015} & = \frac{- (310.185.151.325,00 + 1.253.085.000,00)}{1.142.375.148,00} \\
 & = 9,74 \% \\
 & (17.343.783.489,88+33.530.599.504,00+ 383.218.545.000,00) \\
 3. \text{ DSCR 2016} & = \frac{- (365.059.030.340,00 + 2.313.080.000,00)}{1.196.616.630,00} \\
 & = 5,57 \%
 \end{aligned}$$

5. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan (*Growth Ratio*) mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, dapat digunakan mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu mendapatkan perhatian.

**Tabel 5.4 Perhitungan Rasio Pertumbuhan APBD Kabupaten Gowa Tahun
Anggaran 2014-2016**

No.	Keterangan	2014	2015	2016
1.	Pendapatan Asli Daerah	20.398.764.209,46	21.418.839.483,39	17.343.783.489,88
2.	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah		5,00 %	-19,02 %
3.	Pendapatan	519.069.067.698,96	526.763.453.464,39	606.496.876.693,37
4..	Pertumbuhan Pendapatan		1,48 %	15,13 %
5.	Belanja Operasi	389.126.144.860,40	418.423.506.141,00	496.282.699.295,00
6.	Pertumbuhan Belanja Operasi		7,52 %	18,60 %
7.	Belanja Modal	152.911.613.904,00	120.856.244.770,00	99.857780.515,00
8.	Pertumbuhan Belanja Modal		-20,96 %	-17,37 %

1. Rasio Pertumbuhan 2014 -2015

a. PAD	=	$\frac{21.418.839.483,39 - 20.398.764.209,46}{20.398.764.209,46}$
	=	5,00 %
b. Pendapatan	=	$\frac{526.763.453.464,39 - 519.069.067.698,96}{519.069.067.698,96}$
	=	1,48 %
c. Belanja Operasi	=	$\frac{418.423.506.141,00 - 389.126.144.860,40}{389.126.144.860,40}$
	=	7,52 %
d. Belanja Modal	=	$\frac{120.856.244.770,00 - 152.911.613.904,00}{152.911.613.904,00}$
	=	-20,96 %

2. Rasio Pertumbuhan 2015 – 2016

a. PAD	=	$\frac{17.343.783.489,88 - 21.418.839.483,39}{21.418.839.483,39}$
	=	-19,02%
b. Pendapatan	=	$\frac{606.496.876.693,37 - 526.763.453.464,39}{526.763.453.464,39}$
	=	15,13 %
c. Belanja Operasi	=	$\frac{496.282.699.295,00 - 418.423.506.141,00}{418.423.506.141,00}$
	=	18,60 %

$$\begin{aligned}
 \text{d. Belanja Modal} &= \frac{99.857.780.515,00 - 120.856.244.770,00}{120.856.244.770,00} \\
 &= -17,37 \%
 \end{aligned}$$

5.3 Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Gowa

1. Rasio Kemandirian Daerah

**Tabel 5.5 Rasio Keuangan Daerah Kabupaten Gowa
Tahun Anggaran 2014-2016**

Uraian	2014	2015	2016	Keterangan
Rasio Kemandirian Daerah	4,19%	4,33%	3,01%	Kemandirian daerah dalam mencukupi kebutuhan pembiayaan untuk melakukan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat masih sangat rendah

Dari tabel diatas diketahui bahwa rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Gowa pada tahun anggaran 2014 sebesar 4,19%, naik pada tahun 2015 sebesar 4,33% dan pada tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 3,01%

Hal ini menunjukkan bahwa kemandirian daerah dalam mencukupi kebutuhan pembiayaan untuk melakukan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat masih sangat rendah. Terlihat dari Pendapatan Asli Daerah

yang mengalami naik turun dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, perlu adanya usaha untuk mengurangi ketergantungan terhadap bantuan pihak ekstern (terutama pemerintahan pusat dan provinsi), baik melalui pengoptimalan sumber pendapatan asli daerah khususnya pada pendapatan lain-lain PAD yang sah yang mengalami penurunan di tahun anggaran 2014-2016

2. Rasio Efektifitas dan Efisiensi

**Tabel 5.6 Rasio Efektifitas dan Efisiensi Kabupaten Gowa
Tahun Anggaran 2014-2016**

No.	Uraian	2014	2015	2016	Keterangan
1.	Rasio Efektifitas	62,19 %	59 ,53%	32 ,96%	Pemerintah daerah tidak efektif dalam merealisasikan pendapatan daerah pada tahun 2014-2016
2	Rasio Efisiensi	2,13 %	2,71 %	2,16 %	Pemerintah daerah sangat efisien dalam memungut sumber pendapatan daerah. Semakin kecil rasio efisiensinya menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik.

Berdasarkan hasil perhitungan rasio efektivitas dan efisiensi dapat dilihat bahwa rasio efektifitas Pemerintah Kabupaten Gowa dalam melakukan pemungutan pajak dan retribusi daerah yang merupakan sumber pendapatan asli daerah pada tahun

2014 adalah 62,19 %, 2015 59,53 % dan 2016 32,96 % . Angka ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak efektif dalam merealisasikan sumber pendapatan asli daerah khususnya dalam melakukan pemungutan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Sedangkan dari perhitungan rasio efisiensi diatas kinerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Gowa dapat dikatakan sangat efisien karena dari perhitungan rasio dari tahun 2014 2,13%, 2015 2,71%, dan 2016 2,16% mengalami kenaikan pada tahun pada tahun 2015 yang berarti adanya penurunan kinerja pada pemerintah, lalu pada tahun 2016 rasio efisiensinya mengalami penurunan yang menggambarkan meningkatnya kinerja pemerintah. Ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah mengalami peningkatan kinerja dari segi efisiensinya melakukan pemungutan sumber pendapatan.

3. Rasio Aktivitas (Rasio Keseimbangan)

**Tabel 5.7 Rasio Aktivitas Kabupaten Gowa
Tahun Anggaran 2014-2016**

Uraian	2014	2015	2016	Keterangan
Rasio Belanja Operasi	77,15 %	71,78 %	83,17 %	Sebagian besar dana APBD diiprioritaskan untuk kebutuhan operasional sehingga belanjaoperasional mengalami peningkatan dari tahun 2014 hingga
Rasio Belanja				2016

Modal	28,21 %	22,39 %	16,73 %	Hanya sebagian kecil dana APBD digunakan untuk pembangunan dan itupun rasionya mengalami penurunan dari tahun ke tahun
-------	---------	---------	---------	--

Dari tabel 5.7 diatas terlihat sebagian besar dana yang dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa masih diprioritaskan untuk kebutuhan belanja operasi sehingga rasio belanja modal terhadap APBD masih relatif kecil.

Belum ada patokan yang pasti berapa besarnya rasio belanja operasi maupun belanja modal terhadap APBD yang ideal karena sangat dipengaruhi oleh dinamisasi kegiatan pembangunan dan besarnya kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan. Namun demikian, sebagai negara berkembang peranan pemerintah daerah untuk memacu pelaksanaan pembangunan masih relatif besar. Namun hal ini masih kurang diperhatikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa karena terlihat rasio belanja modal dari tahun ke tahun menurun.

4. Debt Service Coverage Ratio

**Tabel 5.8 Debt Service Coverage Ratio Kabupaten Gowa
Tahun Anggaran 2014-2016**

Uraian	2014	2015	2016	Keterangan
<i>Debt Service Coverage Ratio</i>	1,29%	9,74%	5,57%	Tahun 2015-2016 pemerintah daerah memiliki peluang untuk melakukan pinjaman apabila diperlukan karena terlihat bahwa DSCR Pemerintah Kabupaten Gowa berada diatas standar persyaratan (DSCR > 2,5%) untuk dapat melakukan pinjaman.Sedangkan tahun 2014 pemerintah daerah tidak dapat melakukan pinjaman karena DSCRnya dibawah standar yang ditentukan.

DSCR mengindikasikan kelayakan pemerintah daerah untuk melakukan pinjaman. DSCR ditetapkan minimal 2,5 (Pasal 12, PP No 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah) dan sebaliknya jika DSCR dibawah 2,5 maka tidak diperbolehkan lagi melakukan pinjaman.

Dari tabel 5.8 diatas terlihat bahwa DSCR Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa pada tahun 2014 tidak dapat melakukan pinjaman karena DSCRnya berada dibawah standar. Sedangkan tahun 2015 dan 2016 berada diatas standar (DSCR >2,5). Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah layak melakukan pinjaman, baik jangka menengah maupun jangka panjang apabila terjadi kekurangan dana atau defisit anggaran.

5. Rasio Pertumbuhan

**Tabel 5.9 Rasio Pertumbuhan Kabupaten Gowa
Tahun Anggaran 2014-2016**

Uraian	2014	2015	2016	Keterangan
PAD	-	5,00 %	-19,02 %	Kinerja pemerintahan daerah menunjukkan pertumbuhan yang positif selama tahun 2014-2015 hanya pada belanja modal yang pertumbuhannya negatif. Dan tahun 2015-2016 hanya pertumbuhan pendapatan dan belanja operasi yg mengalami pertumbuhan yang negatif.
Pendapatan	-	1,48 %	15,13 %	
Belanja Operasi	-	7,52 %	18,60 %	
Belanja Modal	-	-20,96 %	-17,37 %	

Dari perhitungan rasio pada tabel 5.9 diatas dapat dijelaskan bahwa pertumbuhan APBD Kabupaten Gowa pada Tahun Anggaran 2014-2015 pertumbuhan pendapatan asli daerah, pertumbuhan pendapatan, pertumbuhan belanja operasi menunjukkan pertumbuhan yang positif, hanya belanja modal yang menunjukkan pertumbuhan negatif. Sedangkan pada tahun 2015-2016 pertumbuhan pendapatan dan pertumbuhan belanja operasi mengalami pertumbuhan yang positif. Sebaliknya dengan pertumbuhan pendapatan asli daerah dan pertumbuhan belanja modal mengalami pertumbuhan yang negatif.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa dalam merealisasikan pendapatan asli daerahnya tergolong tidak efektif dan tergolong efisien, yakni pada tahun 2014 memiliki rasio efektifitas 62,19% dan rasio efisiensi 2,13% kemudian pada tahun 2015 memiliki rasio efektifitas sebesar 59,53% dan rasio efisien 2,71%, dan pada tahun 2016 memiliki rasio efektifitas 32,96% rasio efisien sebesar 2,16%.
2. Kemandirian Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa dalam memenuhi kebutuhan dana untuk penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan sosial kepada masyarakat masih sangat rendah dan bahkan mengalami naik turun dari tahun ke tahun, yaitu dari 4,19 % pada tahun 2014 menjadi 4,33% pada tahun 2015 dan 3,01% pada tahun 2016. Dimana terjadi peningkatan kemandirian daerah yang selanjutnya mengalami penurunan pada tahun 2016.
3. Kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Gowa selama periode penelitian (tahun 2014 sampai tahun 2016 kurang baik karena hampir semua perhitungan rasio mengalami penurunan kinerja.

4. Pertumbuhan APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa tahun anggaran 2014-2016 menunjukkan bahwa pertumbuhan pendapatan asli daerah dan pertumbuhan belanja modal menunjukkan pertumbuhan yang negatif. Sedangkan pada pertumbuhan pendapatan dan pertumbuhan belanja operasi mengalami pertumbuhan yang positif.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dari pembahasan tersebut, maka hal-hal yang dapat disarankan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa dapat menggunakan analisis rasio keuangan untuk melakukan penilaian dan evaluasi kinerja untuk kepentingan manajemen birokrasi pemerintah serta untuk menambah kualitas sistem informasi keuangan daerah.
2. Lebih mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang ada maupun yang belum diolah agar dapat meningkatkan pendapatan asli daerah sehingga ketergantungan terhadap sumber daya ekstern dapat diminimalisir
3. Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa sebaiknya memprioritaskan lagi pengalokasian dana yang dimiliki untuk belanja modal sehingga semakin bertambahnya sarana dan prasarana yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

4 Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa diharapkan dapat meningkatkan kemampuan semua pihak yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan, baik itu dengan memberikan bimbingan teknis dan pelatihan mengenai pengelolaan keuangan daerah. Dengan begitu diharapkan penyusunan laporan keuangan dapat berjalan dengan lancar dan tepat waktu sehingga memudahkan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk tahun anggaran berikutnya serta dapat menjadi informasi yang relevan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa, 2008, *Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Gowa*, Gowa.
- Bappeda Kabupaten Gowa, 2009, *Profil Daerah Kabupaten Gowa 2010*, Gowa.
- Bastian, Indra.2008. *Akuntansi Sektor Publik :Suatu Pengantar*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Darise, Nurlan. 2009. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta. Indeks
- Halim dan Kusufi. 2012. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta. SalembaEmpat
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*.SalembaEmpat.
- Mahsun, Sulisyowati Firmandan Andre Purwanugraha, Herbertus. 2007. *Akuntansi Sektor Publik*, Edisi Ke2: Penerbit BPFE Yogyakarta.
- Mardiasmo, 2009. *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung, PT. RemajaRosdakarya.
- PemkabGowa, 2009. *Makassar Dalam Angka 2010*, Gowa.
- Republik Indonesia.. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690 900 327 Tahun 1996 tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan.
- Republik Indonesia, Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Daerah
- Republik Indonesia, Undang-undaang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No, 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah.